



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

DPRD Karawang Paripurnakan 4 Agenda Pembahasan



Karawang - Java News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang melaksanakan rapat paripurna pada Senin, 20 Agustus 2018 dengan empat agenda pembahasan yaitu Persetujuan Dan Penetapan Rancangan KU-APBD Dan PPAS Tahun Anggaran 2019, Pembentukan Pansus DPRD RAPERDA Tentang Penyelenggaraan ke Olahraga, Perubahan Komposisi Fraksi Dan Alat Kelengkapan Dewan dari Partai Golongan Karya, Penyampaian

Nota Pengantar Rancangan KU-APBD Dan PPAS tahun Anggaran 2018, Rapat penting itu dipusatkan di gedung Paripurna DPRD setempat yang dihadiri oleh ketua DPRD, H. Toto Suropto SE. Juga Bupati karawang dr . Hj. Celica Nurachadiana dan Wakil Bupati H. Ahmad Zamaksyari, serta kepala Dinas Camat, Muspida kabupaten karawang.

Rapat yang dipimpin oleh H. Ajang Sopandi wakil ketua II DPRD kabupaten karawang tersebut juga member masukan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengutamakan skala prioritas belanja APBD Murni 2019 yang menjadi indikator RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD pengesahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2019, Senin sore (20/8/2018). Selain itu, seperti dibacakan anggota Banggar, Danu Hamidi, kalangan legislator Karawang juga meminta eksekutif agar penyusunan anggaran setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus saling sinergis guna menghindari sal-

ing tumpang tindih anggaran.

“Sistem penganggaran pada OPD sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi Banggar. Dan dalam memasukan program unggulan dikonsultasikan dulu kepada masing-masing komisi di DPRD. OPD terkait yang memiliki objek pendapatan diharapkan menaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari tahun sebelumnya sebesar 5 persen. Khusus untuk Bappeda sebagai anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kalau mau melakukan pengurangan atau pemangkasan mesti proporsional,” urai Danu.

Selain itu, efisiensi belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai dan belanja rutin kantor,

diminta Banggar, yaitu dengan mereposisi kepada belanja kebutuhan publik. Di paripurna kali ini, Banggar menyoroti kinerja Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Karawang yang dinilai belum memiliki kemampuan mengejar target PAD dari sektor obyek wisata.

Sedangkan terhadap DP-MPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa-

du Satu Pintu), Banggar merekomendasikan dinas ini memiliki database perijinan terkait maraknya investasi properti, terutama perumahan, di wilayah Kabupaten Karawang. Banggar beralasan, proyeksi pajak daerah pada APBD Murni 2019 baru muncul di angka Rp 993,6 miliar. Itupun setelah targetnya dinaikan menjadi 13,14 persen dari tahun anggaran 2018. (Adv/ro pendi)